

UPAYA BANGLADESH DALAM MENANGGULANGI ISU PENGUNGSI ROHINGYA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**ALZRE ERDIN TRI SATRIA
07041181621020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA BANGLADESH DALAM MENANGGULANGI ISU
PENGUNGSI ROHINGYA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

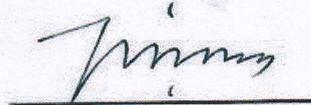
ALZRE ERDIN TRI SATRIA

07041181621020

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk diajukan dalam ujian akhir Program
Sarjana**

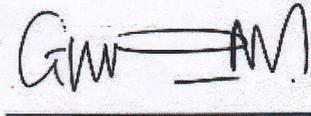
Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, MA..
NIP. 195907201985031002



Pembimbing II

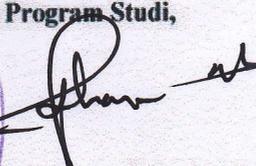
Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP. 198405182018031001



**Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,**



Dr. Azhar, SH., m.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 19650427198903100



HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

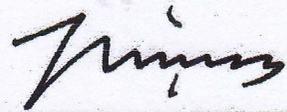
UPAYA BANGLADESH DALAM MENANGGULANGI ISU PENGUNGSI ROHINGYA

SKRIPSI

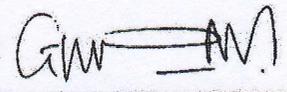
Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi" pada tanggal 18 Maret 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman., MA
Ketua



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota



Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA
Anggota



Indralaya, Maret 2021

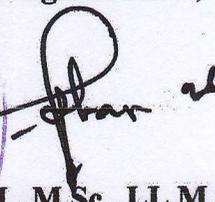
Mengetahui

Ketua Program Studi,



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.

NIP. 196504271989031003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

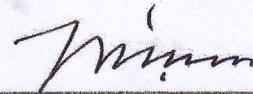
**UPAYA BANGLADESH DALAM MENANGGULANGI ISU
PENGUNGS ROHINGYA**

SKRIPSI

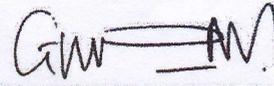
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Maret 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman., MA
Ketua



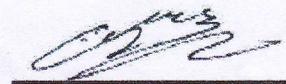
Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota



Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA
Anggota



**Indralaya, Maret 2021
Mengesahkan,
Dekan.**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



PROF. DR. KGS. MUHAMMAD SOBRI, M.SI
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alzre Erdin Tri Satria

NIM : 07041181621020

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Bangladesh Dalam Menanggulangi Isu Rohingya" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 01 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Alzre Erdin Tri Satria

07041181621020

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda (Darwin Burhan) dan Ibunda (Ernawati) tercinta yang senantiasa sudah berjuang dan bekerja keras demi kebahagiaan anak – anaknya. Terima kasih atas limpahan cinta, kasih, do'a, pengorbanan dan kesabaran mereka yang menjadi kekuatan bagi Penulis,
2. Kakak laki-laki (Gilang Kharisma Ramadhan) beserta istrinya (Dina Octaviani) yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis. Semoga Allah senantiasa menyayangi, menjaga, dan meluaskan ilmu kita semua,
3. Kakak perempuan (Wenny Perwanti) beserta suaminya (Anggy Median) yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis. Semoga Allah senantiasa menyayangi, menjaga, dan meluaskan ilmu kita semua,
4. Luthfiah Maretha yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan tenaga yang diberikan untuk penulis.
5. Untuk Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terutama Bapak Zulfikri Suleman dan Bapak Gunawan Lestari Elake selaku pembimbing skripsi penulis
6. Almamater tercinta, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

INTI SARI

Seperti yang diketahui latar belakang masalah ini adalah bahwa Myanmar sudah mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya dan telah melakukan tindakan kekerasan kepada etnis Rohingya yang kemudian membuat banyak sekali etnis Rohingya pergi untuk mencari tempat perlindungan kepada Negara lain. Bangladesh merupakan salah satu Negara tujuan pengungsi Rohingya dari Myanmar. Namun, pengungsi yang datang sudah terlalu banyak sementara Bangladesh termasuk dalam kategori Negara miskin sehingga membuat Bangladesh tidak sanggup lagi menampung lebih banyak Pengungsi, sedangkan pengungsi tidak bisa begitu saja dikembalikan ke Myanmar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder. data diperoleh melalui data - data yang berasal dari hasil rekaman wawancara, foto, artikel, dokumen perusahaan yang dikumpulkan, laporan tertulis/online, buku, jurnal tertulis/online, penelitian sebelumnya yang berkaitan, maupun arsip-arsip yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada penulis menggunakan teori Sekuritisasi Migrasi, berhubungan dengan bagaimana aspek hukum yang mengatur para pengungsi, kebijakan pemerintah yang diambil, prioritas utama dalam sebuah kebijakan, pencegahan dan penahanan yang dilakukan terkait pelanggaran – pelanggaran.

Hasil penelitian antara lain: (1) Bangladesh menyepakati kerjasama dengan UNHCR untuk melaksanakan program repatriasi sukarela yang dilakukan tanpa paksaan dan memberikan hak kepada pengungsi Rohingya apakah mereka sudah ingin kembali ke Myanmar atau masih ingin tetap tinggal di camp pengungsian sembari menunggu kondisi di Myanmar aman. (2) Bangladesh diwakilkan oleh UNHCR untuk mengatasi urusan dengan Myanmar yang mana Myanmar diharuskan mempersiapkan tempat tinggal yang layak kepada pengungsi Rohingya apabila mereka kembali nanti serta mengembalikan hak – hak dasar mereka sebagai warga Negara dan menjamin keamanan para pengungsi Rohingya ketika sudah kembali ke Myanmar.

Adapun saran dari peneliti yaitu : (1) Sembari menunggu Myanmar mempersiapkan pemulangan etnis Rohingya, pemerintah Bangladesh harusnya lebih banyak mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan pengungsi yang tinggal di camp mengingat masih adanya tindak kekerasan hingga pembunuhan yang terjadi antar sesama pengungsi Rohingya. (2) Myanmar lebih terbuka dan bersikap kooperatif kepada pihak UNHCR yang bermaksud membantu agar proses pemulangan bisa terlaksana tepat waktu.

Kata Kunci: Bangladesh, Etnis, Kebijakan, Konflik, Menanggulangi, Myanmar, Pengungsi, Rohingya, UNHCR, Upaya

ABSTRACT

The background of this problem is that Myanmar has stripped Rohingya of their citizenship and has committed acts of violence against the Rohingya ethnic group, which then made a large number of Rohingya leave to seek refuge in other countries. Bangladesh is one of the destination countries for Rohingya refugees from Myanmar. However, too many refugees have come while Bangladesh is categorized as a poor country, making Bangladesh unable to accommodate more refugees, while refugees cannot simply be returned to Myanmar. This study used qualitative research methods with descriptive research type. The data source to be obtained in this research is secondary data. data is obtained from recorded interviews, photos, articles, company documents collected, written / online reports, books, written / online journals, related previous research, and existing archives. To answer existing research questions, the author uses the theory of Migration Security, relating to how the legal aspects regulate refugees, government policies taken, the main priority in a policy, prevention and detention related to violations.

The results of the study include: (1) Bangladesh agreed to collaborate with UNHCR to implement a voluntary repatriation program carried out without coercion and give Rohingya refugees the right whether they want to return to Myanmar or still want to stay in refugee camps while waiting for conditions in Myanmar to be safe. (2) Bangladesh is represented by UNHCR to deal with matters with Myanmar in which Myanmar is required to prepare adequate housing for Rohingya refugees when they return later and restore their basic rights as citizens and ensure the safety of Rohingya refugees when they return to Myanmar.

As for the suggestions from the researchers, namely: (1) While waiting for Myanmar to prepare for the repatriation of the Rohingya ethnicity, the Bangladeshi government should mobilize more security forces to maintain peace and comfort for refugees living in camps considering that there are still acts of violence to killings that occur among Rohingya refugees. (2) Myanmar is more open and cooperative with UNHCR, which intends to help ensure that the repatriation process can be carried out on time.

Keywords: Bangladesh, Efforts, Ethnicity, Conflict, Coping, Policy, Myanmar, Refugees, Rohingya, UNHCR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan kerunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik melalui skripsi yang berjudul “**Upaya Bangladesh Dalam Menanggulangi Isu Pengungsi Rohingya**”

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, Muhammad Sobri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak dan Ibu yang ada di bagian Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman., MA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ferdiansyah R, S.IP., MA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama Penulis menjadi mahasiswa.
10. Mbak Siska dan Kak Dimas, selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu Penulis dalam mengurus akademik mahasiswa, sehingga berjalan dengan lancar.
11. Luthfiyah Maretha yang tak terhingga meluangkan waktu, menghibur, membantu, menjadi teman bermain, memberikan semangat, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Alaa Hifzhiya Nurgina yang telah menghibur dan menjadi teman bermain bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
13. Teman – teman Respect (Adyt, Arief, Ikhsan, Ilham, Pratama, Tarmizi) yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga besar 5babes (Andra, Dicky, Felis, Naura, Oca, Royhan, Tiara, Vita, Yoga) yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh sahabat dan teman – teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 24 Maret 2021

Alzre Erdin Tri Satria
07041181621020

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
INTI SARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Objektif.....	10
1.3.2 Tujuan Subjektif	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	11
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Landasan Konseptual	19
1.6.1 Teori Sekuritisasi Migrasi.....	19
1.7 Alur Pemikiran	26
1.8 Argumen Utama	26
1.9 Metode Penelitian.....	27
1.9.1 Desain Penelitian	27
1.9.2 Definisi Konsep	28
1.9.3 Fokus Penelitian	29
1.9.1 Unit Analisis.....	31
1.9.2 Teknik Pengumpulan Data	32
1.9.3 Teknik Keabsahan Data.....	32
1.9.4 Teknik Analisa Data	32

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Etnis Rohingya	34
2.1.1 Tahun 1978.....	36
2.1.2 Tahun 1991 – 1992.....	37
2.1.3 Tahun 2006 – 2010	37

2.1.4 Tahun 2017.....	38
2.2 Bangladesh.....	39

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peraturan dan Instrumen HAM Yang Mengatur Pengungsi Rohingya di Bangladesh	43
3.2 Kerjasama Bangladesh dan UNHCR	45
3.3 Perjanjian Repatriasi	48
3.3.1 Dinamika Perjanjian Repatriasi tahun 2018	49
3.3.2 Pembatalan Perjanjian Repatriasi	56
3.3.3 Solusi Pasca Batalnya Perjanjian Repatriasi.....	63
3.4 Penahanan dan Pencegahan.....	69

BAB IV PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 1. 2 Fokus Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pengungsi di Tiap Negara	6
Gambar 1. 2 Populasi Pengungsi di Bangladesh	7
Gambar 1. 3 Kondisi Pengungsi Rohingya	8
Gambar 2. 1 Desa Rohingya.....	36
Gambar 2. 2 Pengungsi Rohingya yang Kabur Dari Pembakaran Wilayah.....	38
Gambar 2. 3 Kondisi Pengungsi Rohingya	39
Gambar 2. 4 Peta Wilayah Hutan di Bangladesh	41
Gambar 3. 1 Kamp Pengungsi UNHCR di Bangladesh	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	26
-------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
RRC	: Republik Rakyat China
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
NU	: Nahdlatul Ulama
RSO	: <i>Rohingya Solidarity Organization</i>
ARIF	: <i>Arakan Rohingya Islamic Front</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner For Refugees</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
UNJI	: <i>United Nations Joint Initiative</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Momerandum of Understanding</i>
UN	: <i>United Nations</i>
MDPI	: <i>Multidiciplinary Digital Publishing Institute</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social, and Human Rights</i>
CRC	: <i>Convention on The Rights of The Child</i>
CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CAT	: <i>Convention Againts Torture</i>
UNICEF	: <i>The United Nations Children's Fund</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

UNFPA	: <i>The United Nations Population Fund</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
FFM	: <i>The United Nations' Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar</i>
EBA	: <i>Everything But Arms</i>
OI	: Organisasi Internasional
JRP	: <i>Joint Response Plan</i>
AICHR	: <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
UU	: Undang - Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki populasi lebih dari 52,83 juta atau posisi kelima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN berdasarkan data statistika 2019 (Databoks, 2019). Myanmar merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman etnis tinggi yang berjumlah 135 etnis seperti Bamar, Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Rakhine, Shan dan lain lain. (*Ministry of Hotel and Tourism of the Union of Myanmar, 2019*).

Dari berbagai etnis yang ada di Myanmar ada satu etnis yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan dianggap sebagai imigran gelap yaitu etnis Rohingya (*Ministry of Foreign Affairs of the Union of Myanmar, 1992*). Kaum Rohingya mayoritas menempati daerah Rakhine Myanmar. Alasan pemerintah Myanmar tidak ingin menjadikan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar adalah karena adanya perbedaan fisik, agama, dan bahasa yang mana etnis Rohingya dianggap berbicara seperti orang Bengali. Pemerintah Myanmar menuduh etnis Rohingya adalah kelompok pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.

Antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh (Rahma, 2017). Pada tahun 1948 – 1962 etnis Rohingya sebenarnya tidak terlalu dipermasalahan oleh pemerintah Myanmar bahkan ada orang Rohingya yang masuk kedalam pemerintahan dan menjabat sebagai menteri.

Keberadaan etnis Rohingya mulai dipermasalahkan bermula dari dukungan Rohingya kepada Inggris yang kemudian mengancam posisi strategis para kaum elit Burma (Myanmar) yang mayoritas Buddha di zaman penjajahan Jepang. Setelah Burma (Myanmar) merdeka pun, Rohingya pernah menuntut untuk memisahkan diri dan berdiri menjadi sebuah negara sendiri. Karena hal ini maka di mata pemerintahan Burma (Myanmar) semua aktivitas muslim Rohingya dipandang sebagai akar dari tindakan pemberontakan. Sementara disisi lain, isu bahwa Rohingya merupakan imigran gelap asal Bangladesh yang dimobilisasi pada masa penjajahan Inggris juga membuat penerimaan masyarakat etnis Rohingya rendah. Etnis Rohingya dianggap sebagai saingan tambahan yang semakin menyulitkan perekonomian masyarakat Rakhine yang miskin, walaupun mereka memiliki sumber daya yang melimpah (Syahartijan, 2018).

Ditambah pada tahun 1962 terjadi kudeta oleh jenderal Ne Win, pada saat itulah Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine karena dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan di tahun 1978 Jenderal Ne Win memberlakukan operasi Naga Min atau sensus penduduk untuk semua penduduk Myanmar yang berujung pada hilangnya status kewarganegaraan etnis Rohingya (Amnesty Internasional, 2004). Hal ini dikarenakan Rohingya dianggap tidak memenuhi syarat hukum agar bisa diberikan status kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan tahun 1982 yang megatakan bahwa jika Rohingya ingin mendapatkan status kewarganegaraan maka mereka harus bisa menyatakan bukti valid bahwa etnis tersebut telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823. Namun, etnis Rohingya tidak memiliki cukup bukti (Perlez, 2014). Tindakan pemerintah Myanmar tersebut mendapat dukungan dari RRC mengingat RRC memiliki kepentingan

ekonomi kepada Myanmar berupa proyek pipa gas yang jalurnya melewati wilayah Rakhine tempat dimana etnis Rohingya tinggal (Sausan, 2018).

Akibat keberagaman budaya, etnis dan agama kemudian menjadi penting bagi kehidupan negara Myanmar. Adanya perbedaan - perbedaan tadi sangat mempengaruhi bidang politik dan ekonomi. Tindakan Pemerintah yang didominasi oleh etnis Burma atau Bamar menimbulkan banyak konflik karena usaha mereka untuk melakukan Burmanisasi atau upaya peleburan budaya dan integrasi etnik sehingga memarjinalkan etnis tertentu. Terjadi perlawanan fisik militer serta menimbulkan konflik akibat adanya paksaan dari rezim militer Burma atau biasa disebut Junta Militer. Pemerintahan junta militer banyak menimbulkan kesengsaraan di kalangan masyarakat terutama etnis minoritas di Myanmar(Thontowi, 2013:9). Konflik bukan hanya terjadi karena rezim Myanmar akan tetapi konflik etnis juga terjadi karena gesekan atau persengketaan wilayah antar etnis sendiri(Adi Permana, 2020), salah satunya terjadi di *Rakhine State*. Hal ini terus memburuk hingga pecahnya konflik sipil di Rakhine pada tahun 1978 (Dali, 2017).

Hal ini berlanjut pada 1991 – 1992 yang membuat hampir 300.000 rakyat Rohingya melarikan diri dikarenakan banyaknya tindakan kejam pemerintah Myanmar seperti kerja paksa, Pemungutan pajak yang sewenang – wenang, penyiksaan dan pemerkosaan, serta penganiayaan. Pada tahun 2006 – 2010 jumlah pengungsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2010. Lalu pada 2017 terjadi operasi bumi hangus yang dilaksanakan oleh militer Myanmar sebagai respon dari serangan militan muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang menewaskan kurang lebih 10 polisi. Saat itu tindak kekerasan meletus di Negara Bagian Rakhine Myanmar, memicu arus pengungsian besar-besaran ke Bangladesh.

Sejak terjadinya operasi militer yang represif dan membabitkan dari pemerintah Myanmar, rakyat Rohingya memilih untuk meninggalkan wilayah mereka dan mencari tempat pengungsian ke negara lain. Rakyat Rohingya saat ini tersebar di beberapa negara. Jumlah mereka terus bertambah di berbagai negara. Merujuk dari banyaknya para pengungsi yang pergi dari Myanmar, maka populasi etnis Rohingya yang sekitar 1,3 juta di Myanmar makin hari kian susut (Jawapos, 2017)

Sebagian besar pengungsi pergi ke Bangladesh. Menurut data dari *Central Intelligence Agency (CIA)*, Bangladesh merupakan negara berkembang yang banyak memiliki persoalan yang musti dituntaskan seperti ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, infrastruktur yang terbilang buruk, korupsi endemik, pasokan listrik yang tidak mencukupi, serta lambatnya implementasi reformasi ekonomi. Pengungsi Rohingya hanya menambah beban persoalan Bangladesh menjadi semakin berat,

Mayoritas pengungsi Rohingya di Bangladesh ditampung di Cox's Bazar, salah satu distrik Bangladesh yang paling dekat dengan perbatasan Myanmar. Bangladesh kesulitan memberikan makanan, air, dan obat-obatan yang tidak mencukupi untuk membantu para pengungsi. Insiden-insiden perkelahian banyak terjadi serta sejumlah truk pengangkut bantuan yang sering dikepung oleh para pengungsi yang merasa putus asa. Pihak pemerintah kewalahan hingga mengirimkan tambahan personel dari kepolisian dan militer di beberapa tempat guna menjaga ketertiban dan keamanan (DetikNews, 2017).

Begitu juga dengan lingkungan, sebagaimana dikutip dari laman berita NU (NU Online) berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Bangladesh arus pengungsi Rohingya yang datang secara besar-besaran telah menyebabkan kerusakan di hutan dan mengakibatkan kerugian untuk pemerintah Bangladesh sebesar 1,5 miliar taka atau sekitar 246 miliar rupiah. Hal ini didasari alasan bahwa para

pengungsi Rohingya memiliki kebutuhan akan bahan bakar dan karena itulah mereka mengumpulkan bahan bakar dari hutan yang kemudian merusak lingkungan. Tidak hanya itu, bukit tempat penampungan air serta pantai di Cox's Bazar tempat tinggal pengungsi Rohingya mengalami kerusakan lingkungan akibat eksodus Rohingya dari Rakhine State disusul operasi militer bersenjata yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Adanya pengungsi yang datang dengan jumlah banyak membuat pemerintah Bangladesh harus mengalokasikan lahan lebih dari 1000 hektare (NU, 2017)

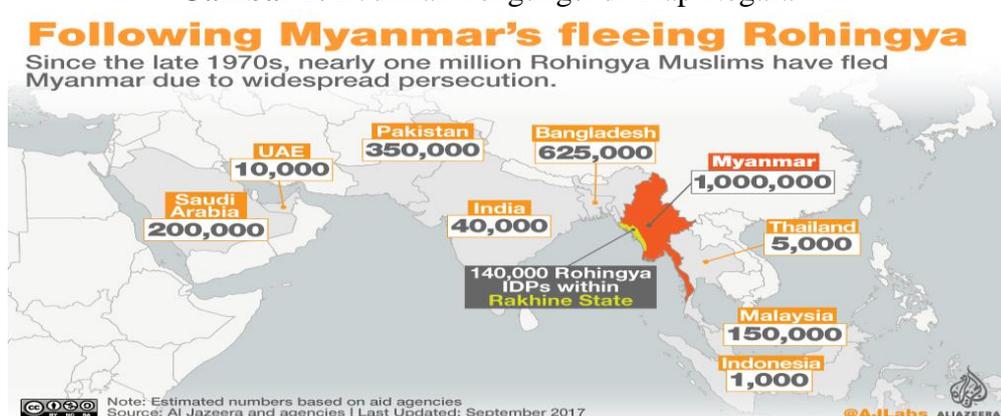
Pemerintah Bangladesh pada mulanya menerima kedatangan rakyat Rohingya dengan tangan terbuka, walaupun keadaan dalam negeri Bangladesh juga mengalami kesulitan dan berharap dapat mengakhiri permasalahan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Kehadiran masyarakat Rohingya secara besar – besaran dan jangka panjang tersebut berdampak terhadap Bangladesh dimana Bangladesh harus mengeluarkan dana lebih untuk memberikan perlindungan dan makan kepada para pengungsi. Selama beberapa dekade Bangladesh semakin kesulitan dalam menampung pengungsi yang terus menerus datang. pasokan bantuan kemanusiaan dari organisasi-organisasi kemanusiaanpun mulai menipis. Banyak permasalahan yang kemudian muncul di pengungsian diantaranya adalah kekurangan makanan dan malnutrisi, permasalahan pelayanan kesehatan, suplai air, sanitasi, tempat tinggal, kesempatan dan kebebasan yang terbatas, pendidikan. Akhirnya, pengungsi Rohingya tidak lagi ingin menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan. Mereka mulai memberanikan diri untuk keluar dari kamp pengungsian untuk mencari pendapatan agar mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Masalahnya adalah para pengungsi ini terkadang “menghalalkan” segala cara untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Akibatnya, mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal seperti keluar kamp pengungsian dan bekerja sebagai buruh harian, tukang kayu, pelayan rumah makan,

dan tukang becak. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap permasalahan ketenagakerjaan karena para pengungsi ini tidak mengantongi tanda pengenal sebagai pekerja imigran atau izin untuk bekerja yang menimbulkan tekanan bagi beban ekonomi setempat yang berdampak pada kesempatan kerja masyarakat lokal karena etnis Rohingya menawarkan upah bekerja jauh dibawah rata – rata pasar kerja setempat sehingga menghancurkan keseimbangan upah kerja yang didapat para pekerja lokal seperti pada umumnya (Nabila, 2017). Para pengungsi Rohingya juga menjadi penyelundup barang – barang seperti buah, garam, pupuk, obat – obatan, beras, udang, gula, hewan ternak, minyak kedelai, diesel, dan kayu yang dijual lintas kota oleh pebisnis lokal. Para pengungsi ditugaskan mengawal transportasi untuk sampai ke daerah tujuan (Nabila, 2017). Bukan hanya itu pengungsi Rohingya secara tersembunyi terlibat pada aktivitas – aktivitas penjualan dan pendistribusian kombat, narkoba, dan senjata yang dilakukan oleh kelompok – kelompok ekstrimis seperti Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO) dan *Arakan Rohingya Islamic Front* (ARIF). Hal inilah yang kemudian mengancam stabilitas nasional Bangladesh (Nabila, 2017).

Terdapat dua faktor utama mengapa penulis memilih topik ini untuk diteliti antara lain :

- A. Bangladesh merupakan negara dengan jumlah pengungsi Rohingya terbanyak

Gambar 1. 1 Jumlah Pengungsi di Tiap Negara

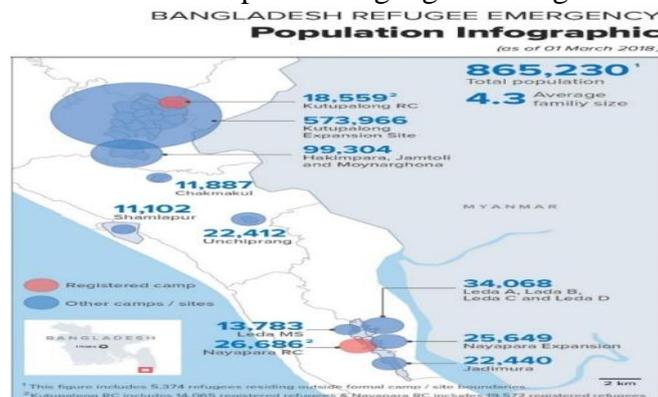


Sumber : Data dari Al Jazeera and agencies pada 2017

Bangladesh merupakan Negara dengan jumlah pengungsi Rohingya paling banyak. Pada tahun 2017 terjadi migrasi besar-besaran yang membuat jumlah pengungsi semakin bertambah banyak. Memasuki tahun 2018 angka pengungsi di Bangladesh sudah melebihi 800.000 jiwa.

Berikut adalah peta persebaran kamp – kamp pengungsian etnis Rohingya yang tersebar di wilayah Bangladesh. Bukan hanya itu, terdapat juga data jumlah pengungsi Rohingya yang tersebar di Bangladesh.

Gambar 1. 2 Populasi Pengungsi di Bangladesh



Sumber : United Nations High Comissioner For Refugees (UNHCR)

Etnis Rohingya pergi dari Myanmar dengan melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar. Kebanyakan dari mereka memasuki wilayah Bangladesh melalui perairan. Ratusan ribu etnis Rohingya meninggalkan desa mereka demi menyelamatkan nyawa. Mereka pergi dengan perlengkapan seadanya dan menggunakan perahu yang sederhana ke wilayah Bangladesh untuk menuju kamp pengungsian yang telah dipadati pengungsi tanpa kepastian nasib (Republika, 2017).

Gambar 1. 3 Kondisi Pengungsi Rohingya



Sumber: Republika, 2017

B. Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan

Berdasarkan data dari organisasi internasional burmacampaign, sejak diberlakukannya *Burma Citizenship Law 1982* Rohingya kehilangan kewarganegaraannya. Dibawah undang – undang ini kewarganegaraan ditentukan berdasarkan ras yang telah menempati Myanmar sebelum 1824, tahun saat pendudukan inggris pertama kali. Meskipun telah tinggal selama beberapa generasi, etnis Myanmar tidak masuk diantara ras tersebut.

“The 1982 Citizenship Law has been applied in a discriminatory and arbitrary manner that has further led to the deprivation of Rohingya citizenship.”

Sumber : Organisasi Internasional Burmacampaign

Etnis Rohingya diberikan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan selama mereka bisa memberikan bukti berupa dokumen bahwa etnis tersebut telah

menempati Myanmar sebelum 4 Januari 1948. Akibat kurangnya dokumen, implementasi hukum yang diskriminatif dan tingginya standar yang diberikan pemerintah Myanmar kepada Rohingya membuat kehilangan kewarganegaraannya (Burma Campaign, 2014).

Masalah pengungsi ini awalnya dianggap Bangladesh sebagai suatu tanggung jawab kemanusiaan yang kemudian justru malah berubah menjadi sebuah ancaman yang mengganggu stabilitas Negara Bangladesh. Dalam isu ini Myanmar merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dikarenakan isu ini adalah isu yang disebabkan oleh kekacauan yang dilakukan Myanmar yang akhirnya sampai berdampak ke Bangladesh.

Isu Rohingnya di Myanmar bahkan hingga tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan literasi yang menyebutkan bahwa isu ini sudah terselesaikan karena masalahnya sangat kompleks dan tidak sederhana yang dibayangkan. Dari penjelasan diatas penulis terdorong untuk meneliti tentang upaya Bangladesh dan Myanmar dalam menanggulangi krisis pengungsi pada tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diuraikan rumusan masalah dari proposal skripsi ini yaitu:

“Bagaimana upaya Negara Bangladesh dalam menanggulangi pengungsi Rohingnya”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui tindakan yang diambil pemerintah Bangladesh kepada Myanmar dalam menindaki isu pengungsi Rohingya.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bangladesh dan Myanmar terkait pengungsi rohingya sebagai korban konflik sipil di Rakhine State;

1.3.2 Tujuan Subjektif

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya;
2. Untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai teori serta praktek dalam bidang hubungan internasional;
3. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini adalah agar upaya yang dilakukan Bangladesh dan Myanmar dalam menindaki isu pengungsi Rohingya dapat dijadikan contoh dan acuan bagi negara – negara lain dalam menghadapi isu pengungsi di negaranya masing – masing terutama Indonesia

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

1. Dapat menjadi wadah dalam mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperolehnya;
2. Dapat memberikan masukan serta pengetahuan terhadap masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dapat berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memasukna beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai berikut :

Pertama, Merry & Yessy Olivia dalam penelitiannya yang berjudul “Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program *UNHCR “United Nations Joint Initiative” Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)*”. Jurnal ini memaparkan mengenai strategi UNHCR dalam menangani isu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana Bangladesh menyikapi progam “*United Nations Joint Initiative*” yang dilakukan oleh UNHCR di negaranya pada tahun 2006 hingga tahun 2011.

Kedua, Tiara Ayu Dewinta dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013”. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana negara - negara muslim melalui Organisasi Kerja Sama Islam merespon konflik Rakhine State yang menyengsarakan etnis muslim Rohingya. Jurnal

ini menjelaskan tentang upaya yang bisa dilakukan OKI terhadap konflik Rakhine yang terjadi pada periode 2012 – 2013.

Ketiga, Triono dengan penelitiannya yang berjudul “Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya”. Jurnal ini menjelaskan tentang ASEAN yang mencoba membantu penyelesaian konflik Rakhine State sebisa mungkin dengan solusi – solusi yang ditawarkan oleh ASEAN. Jurnal ini pula memaparkan tentan batasan – batasan yang tidak bisa dilewati oleh ASEAN dalam penyelesaian konflik *Rakhine State* yang melibatkan etnis Rohingya.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Yessy Olivia & Merry
	Judul	Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program Unhcr “ <i>United Nations Joint Initiative</i> ” Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)
	Nama Jurnal	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol 1, No 1
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan tanggapan Bangladesh tentang “ <i>United Nations Joint Initiative</i> ” melalui UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bangladesh sekarang menampung 29.016 Rohingya. Para pengungsi telah menyebabkan masalah sosial dan ekonomi bagi pemerintah Bangladesh selama 33 tahun yang dikhawatirkan akan

		<p>mengganggu stabilitas negara Bangladesh. UNJI diusulkan oleh UNHCR untuk membantu Rohingya dan Bangladesh.</p> <p>Bangladesh menolak proposal UNHCR karena UNJI telah menyebabkan ancaman keamanan bagi negara Bangladesh. UNJI dianggap memberikan bantuan kepada Pengungsi tanpa peduli tentang apa yang akan terjadi pada penduduk setempat, itu terlihat dari semakin padatnya penduduk, semakin banyaknya pekerjaan, dan kekurangan pangan. Dengan kata lain UNJI dianggap kurang efektif untuk digunakan sebagai solusi kepada pengungsi Rohingya karena UNJI tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi di Bangladesh.</p>
	Perbandingan	<p>Yang membedakan antaran penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah penulis melalui penelitiannya mencoba menjelaskan mengenai upaya pemerintah bangladesh dalam menemukan langkah tepat dan mencari solusi terbaik terkait penanggulangan pengungsi yang sudah ada di Bangladesh sejak bertahun tahun serta bagaimana dinamika yang terjadi selama pengupayaan dalam menangani pengungsi tersebut.</p>
2	Nama Penulis	Tiara Ayu Dewinta
	Judul	Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013
	Nama Jurnal	Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, , hal. 127-134

Tahun	2016
Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik antar etnis di Rakhine yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar pada 2012. Konflik ini telah menyita perhatian masyarakat internasional karena dicurigai melanggar hak asasi manusia. Konflik internal ini menyebabkan banyak korban dan meningkatkan jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tetangga dan secara tidak langsung telah melibatkan beberapa negara, baik IGO atau LSM. Salah satu organisasi internasional yang memperhatikan konflik ini adalah Organisasi Kerjasama Islam. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam dalam konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Organisasi Kerjasama Islam termasuk sebagai pemrakarsa, fasilitator, dan mediator. Organisasi Kerjasama Islam telah berusaha untuk menjalankan perannya sebagai IGO dalam membantu menyelesaikan konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya di Myanmar.</p>
Perbandingan	<p>Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah aktor utamanya dimana penelitian ini menggunakan Organisasi Kerjasama Islam sebagai aktornya sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan negara Bangladesh sebagai Aktor utamanya.</p>

		Perbedaan lainya terdapat pada tahun yang diteliti dimana penelitian ini melakukan penelitian untuk tahun 2012 sedangkan penelitian yang penulis teliti terfokus pada tahun 2018.
3	Nama Penulis	Triono
	Judul	Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya
	Nama Jurnal	Jurnal TAPIs Vol.10 No.2
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran ASEAN sebagai organisai regional yang meliputi wilayah Myanmar dalam menangani Konflik Rohingya di Myanmar. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik Rohingya belum berperan secara optimal dalam penanganan kasus Rohingya karena terbentur prinsip non-intervensi yang ditetapkan ASEAN. Sejauh ini ASEAN hanya melakukan langkah – langkah yang dianggap aman untuk diambil seperti ASEAN hanya melakukan diaolog dan pertemuan regional dan penanganan pengungsi Rohingya, namun tidak diikuti dengan melakukan langkah konkret untuk menghentikan penyebab utama konflik yakni melegalkan status etnis Rohingya sebagai warga negara yang sah di Myanmar sebagai bentuk komitmen negara-negara anggota ASEAN.</p>
Perbandingan	Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang	

		<p>penulis teliti adalah aktornya. Pada penelitian ini ASEAN berperan sebagai aktor utama sebagai organisasi regional dengan prinsip - prinsipnya untuk menemukan solusi yang efektif kepada etnis Rohingya dalam konflik Rakhine yang terjadi. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti Bangladesh muncul sebagai aktor utama yang berupaya menemukan langkah tepat serta mencari solusi terbaik untuk nasib hidup ratusan ribu pengungsi Rohingya yang terlanjur menyebar di penjuru negara Bangladesh.</p>
4	Nama Penulis	Gonda Yumitro
	Judul	Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya
	Nama Jurnal	Jurnal Sosial Politik, Vol. 3 No. 2
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	<p>Tulisan ini berbicara mengenai bagaimana respon dunia internasional baik itu negara, organisasi regional, dan organisasi internasional yang melakukan berbagai upaya intervensi untuk segera menyelesaikan isu persoalan etnis Rohingya karena telah melanggar nilai – nilai moral dan kemanusiaan. Masih perlu langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah karena berbagai macam hambatan yang ada. Pada penelitian ini penulis menekankan pada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mendukung nilai</p>

		– nilai moralitas dan kemanusiaan dalam menyelesaikan akar persoalan.
	Perbandingan	Pada penelitian ini, lebih menjelaskan mengenai respon dunia secara umum terhadap tragedy kemanusiaan Rohingya. perbedaan yang dapat dilihat pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis lebih fokus ke Bangladesh beserta upaya – upaya yang dilakukan guna mengatasi persoalan pengungsi Rohingya yang sudah ada dan tinggal di kamp – kamp pengungsian di Bangladesh sejak puluhan tahun yang lalu.
5	Nama Penulis	Tri Joko Waluyo
	Judul	Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar
	Nama Jurnal	Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2
	Tahun	2013
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjabarkan mengenai konflik yang terjadi antar warga Myanmar yang bermula dari sebuah kasus pembunuhan seorang gadis Buddha yang dituduh dibunuh oleh kelompok pemuda dari etnis Rohingya. Dengan adanya kasus itu memicu kemarahan warga yang bergamam Buddha sehingga menyebabkan kematian ribuan orang dari etnis Rohingya akibat pembunuhan junta militer Myanmar. Kebenaran dari berita mengenai gadis Buddha yang dibunuh oleh kelompok etnis Rohingya adalah palsu dimana yang

		terjadi adalah gadis tersebut dibunuh oleh kekasihnya dan beberapa pemuda dari agama Buddha.
	Perbandingan	Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara tulisan ini dengan penelitian yang penulis teliti, dimana isu ini diawali oleh masalah antara dua anak muda yang kemudian memicu konflik yang menewaskan ribuan orang. Masalah yang terjadi pun hanya sebatas konflik antar warga negara saja, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai bagaimana isu pengungsi Rohingya yang terjadi kemudian menyebar hingga berdampak pada negara Bangladesh dimana Bangladesh harus memikirkan upaya untuk menyelesaikan isu pengungsi yang telah memasuki dan tinggal di Bangladesh.
6	Nama Penulis	Jawahir Thontowi
	Judul	Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional
	Nama Jurnal	Jurnal Pandecta Vol. 8 No. 1
	Tahun	2013
	Hasil Penelitian	Jurnal ini membahas mengenai bagaimana negara Myanmar melakukan tindakan sewenang – wenang terhadap etnis Rohingya serta diskriminasi yang terjadi sehingga menyebabkan kesengsaraan dan tindak kekerasan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar yang kemudian memicu respon dari Organisasi Kerjasama Islam

		(OKI) dan ASEAN yang berupaya memfasilitasi terciptanya sebuah kesepakatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan serta melakukan intervensi kemanusiaan guna menjaga kedamaian.
	Perbandingan	Pada penelitian yang penulis teliti, pengungsi Rohingya sudah berada di Bangladesh dan menunggu adanya solusi. Penulis lebih fokus kepada upaya yang dilakukan Bangladesh untuk menemukan langkah konkret guna memulangkan para pengungsi yang sudah sangat banyak untuk kembali ke wilayah mereka di Myanmar.

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Teori Sekuritisasi Migrasi

Sekuritisasi sebenarnya merupakan salah satu teori keamanan yang lebih berkembang daripada teori keamanan tradisional yang awalnya bukan merupakan isu keamanan dan kemudian berubah menjadi isu keamanan. Menurut *Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah "... the move that takes ... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics*. Dalam kaitan ini maka istilah securitization secara sederhana dipahami sebagai suatu proses dimana suatu isu dipahami sebagai suatu masalah keamanan. Pada hakekatnya sekuritisasi adalah suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai

suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada (Soesilowati dan Sartika, 2011).

Seiring perkembangan, sekuritisasi kemudian dijabarkan lagi menjadi bermacam – macam jenis, salah satunya adalah sekuritisasi migrasi. Philippe Bourbeau dalam teorinya menyebutkan bahwa: *“Migration Securitization theory is a theory that a portrait of the movement of a person who passed the boundary of a country and is an order system that will underlie the movement of any person. This theory seeks to combine a system of migration into a security framework or in other words how migration can be a part of the security”* Bourbeau (Hardi & Kholit, 2017). Sekuritisasi Migrasi menurut Phillippe Bourbeau adalah sebuah teori yang menggambarkan tentang pergerakan seseorang yang melewati tapal batas suatu negara dan merupakan suatu tatanan sistem yang mendasari akan pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk menggabungkan antara suatu sistem migrasi ke dalam sebuah kerangka kerja keamanan atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri. Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta saliency terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan problem keamanan. *“in order to better understand the phenomenon of securitized migration are safe, i use three indicator; legal, policy statement, and saliency.”* Bourbeau (dalam Hardi & Kholit, 2017). Dari pengertian teori migrasi tersebut dapat kita lihat bahwa dinamika migrasi yang terjadi pada setiap negara selalu berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari sifat para imigran itu sendiri. Hal ini tidak

menutup kemungkinan terjadinya ancaman atas adanya migrasi dalam suatu negara. Maka, pengamanan merupakan suatu hal yang penting guna mengendalikan arus migrasi supaya tidak terjadi hal hal yang dapat mengganggu keamanan suatu negara. Selain itu, peran dari komunitas internasional juga penting untuk menghadapi permasalahan yang dapat timbul akibat dari migrasi dalam suatu negara (Hardi & Kholit, 2017). Pada teori ini dipaparkan bagaimana migrasi pada suatu negara bisa dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari ancaman dan pelanggaran yang muncul dari para imigran.

Philippe Bourbeau membagi teori Sekuritisasi Migrasi ini ke dalam dua kategori, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi tiga. Kategori tersebut yaitu pertama,

A. *Institutional Category* (Kategori Institusi)

Pada kategori ini, Philippe menyatakan bahwa: “*The constitution is a set of indicators that offer on the securitization of migration in pairs*”. Institusi merupakan sebuah rangkaian indikator yang menawarkan tentang sekuritisasi migrasi secara berpasangan. Hal ini dilakukan dengan memasang atau menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan satu sama lain pada suatu institusi pemerintahan. Misalnya dengan memasukkan indikator hukum, kebijakan pemerintah serta memasukkan indikator keamanan dan migrasi yang telah terhubung dengan kebijakan suatu negara. Kategori institusi ini terbagi menjadi tiga indikator penting, pertama:

1. *Legal Indicator* (Hukum). Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam segala hal, termasuk dalam proses sekuritisasi migrasi. Setiap negara pasti memiliki peraturan hukum tersendiri yang terkait dengan migrasi, baik itu mengenai tujuan, prosedur seorang warga asing yang ingin masuk ke negara tersebut, serta tindakan yang akan dilakukan oleh suatu negara jika terjadi ancaman keamanan dari para imigran. Terkait dengan dampak konflik Rohingya, Bangladesh tidak memiliki hukum nasional yang bisa mencakup masalah pencari suaka. Namun di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang sah untuk menolak para pengungsi Rohingya karena tidak menjadi pihak dalam konvensi PBB yang berkaitan dengan *refugees status 1951* dan *protocol of 1967*. Hal ini dikarenakan berlakunya hukum lama di Bangladesh seperti *Foreign Law 1946*, *Bangladesh Entrance Control Act 1952*, dan *Passport Act 1920*. (Imran dan Nannu, 2014)
2. *Policy Statement Indicator* (Kebijakan Pemerintah). Sebuah proses migrasi sering kali berkaitan dengan keamanan suatu negara. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas migrasi yang cenderung selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai keamanan. Permasalahan ini pada akhirnya akan menjadi sebuah ancaman bagi negara. Permasalahan tersebut dapat berupa *illegal migration* hingga kasus terorisme transnasional yang akan mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Philippe berkata bahwa, “*..in order to help smooth the securitization of migration by a country will require an element or institutions concern on security issues in migration*” Bourbeau (dalam Hardi & Kholit, 2017). Dapat diartikan bahwa untuk membantu kelancaran sekuritisasi migrasi

oleh suatu negara maka diperlukan sebuah elemen fokus terhadap permasalahan keamanan dalam migrasi. Terkait hal tersebut untuk mengatasi masalah pengungsi yang berkepanjangan ini Bangladesh memerlukan bantuan dari Organisasi Internasional khusus menangani pengungsi yakni *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*. Pada tahun 1993 UNHCR menandatangani perjanjian atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah Bangladesh tentang kerjasama yang berfokus pada repatriasi dan penyediaan bantuan perawatan dan pemeliharaan bagi pengungsi yang harus tetap tinggal di kamp (UNHCR, 2011). Di lihat dari Program – program yang telah dilakukan UNHCR serta tanggung jawabnya pada berbagai pihak menurut perlindungan bagi pengungsi membuat organisasi ini sangat diperlukan dalam menangani kasus pengungsi di Bangladesh. Oleh sebab itu, *MoU Repatriation Programme UNHCR – Bangladesh* tahun 1993 dijadikan satu satunya dasar hukum UNHCR untuk beroperasi lebih lanjut di Negara Bangladesh. (Mery dan Yessy, 2014)

3. *Saliency Indicator*. merupakan sebuah kekuatan yang menghubungkan antara migrasi dan keamanan. Dalam hal ini, *saliency* dikaitkan dengan seberapa kuatnya hubungan antara migrasi dengan keamanan di dalam kebijakan suatu negara. Hal tersebut dapat kita lihat ketika permasalahan tentang migrasi sudah menjadi permasalahan utama dalam sebuah negara sehingga masalah ini dijadikan sebagai prioritas utama dalam sebuah kebijakan (Hardi & Kholit, 2017). Dengan dijadikannya permasalahan migrasi sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan oleh suatu negara, maka perlu adanya pemberitahuan dan kerja sama dengan suatu

organisasi maupun negara lain untuk turut serta membantu mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan karena kasus migrasi ilegal yang berlebihan seperti ini dapat membahayakan stabilitas keamanan suatu negara. Indikator ini berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bangladesh pada tahun 2018, dimana tahun 2018 dimulainya program repatriasi antara Bangladesh dan Myanmar yang akan memulangkan pengungsi Rohingya selama periode dua tahun. Dan proses pemulangan gelombang pertama akan dimulai pada awal 2018 (Octavia, 2019).

B. *Security Practice Category* (Kategori Praktik Keamanan)

Kategori ini menjelaskan mengenai praktik atau tindakan yang dilakukan terkait dengan keamanan migrasi. Pelaksanaan ini merupakan implementasi dari proses sekuritisasi migrasi. Praktik keamanan sangat penting karena pencapaian keamanan pada proses migrasi dalam suatu negara harus didukung dengan pelaksanaan keamanan, tidak hanya mengandalkan hukum dan kebijakan saja. Philippe membagi kategori praktik keamanan menjadi dua indikator yaitu:

1. *Interdiction Indicator* (Pencegahan) yang bertujuan untuk menghentikan atau mengalihkan arus migrasi yang ada. Indikator ini berkaitan dengan penelitian penulis dimana penulis akan menganalisa tentang langkah – langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bangladesh yang berkaitan dengan isu ini.
2. *Detention Indicator* (Penahanan) yang berguna ketika ada tindakan ancaman maupun pelanggaran yang dilakukan imigran. Apabila ada

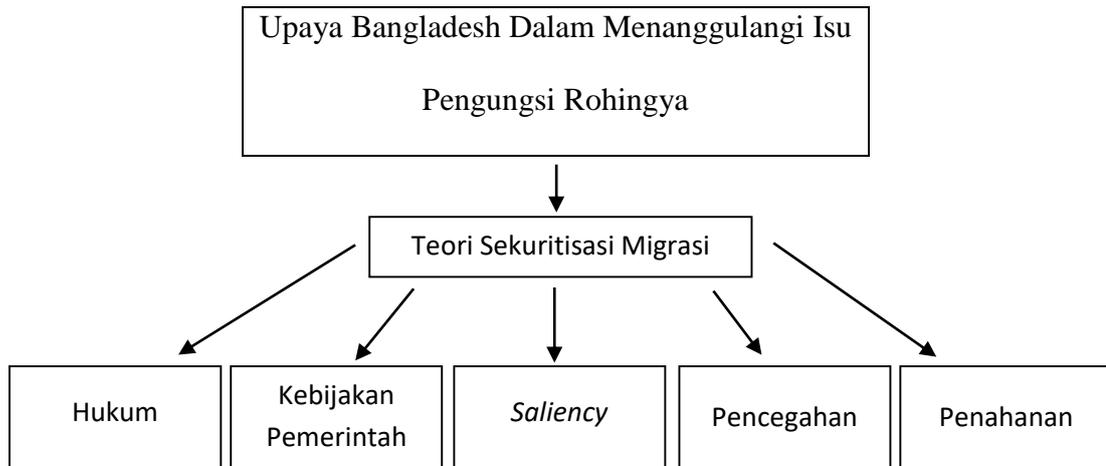
tindakan pelanggaran, kemudian akan dilakukan penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prosedur yang ada guna memberikan rasa jera terhadap para pelaku tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku (Hardi & Kholit, 2017).

Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta *saliency* terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan masalah keamanan.

Masalah pengungsi ini awalnya dianggap Bangladesh sebagai suatu tanggung jawab kemanusiaan yang kemudian justru malah berubah menjadi sebuah ancaman yang mengganggu stabilitas Negara Bangladesh karena jumlahnya sudah terlalu banyak sehingga Bangladesh kewalahan untuk mengurus pengungsi ini. Pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memberlakukan suatu permasalahan yang sebenarnya hanya perlu penanganan ‘biasa’ menjadi sebuah isu yang sangat mengancam keamanan nasional Bangladesh sehingga perlu upaya khusus. Maka penulis ingin menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan Bangladesh dalam menanggulangi isu pengungsi Rohingya.

Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode deskriptif ini diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

1.7 Alur Pemikiran



Grafik 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.8 Argumen Utama

Konflik yang dialami oleh rakyat muslim Rohingya adalah gambaran dari konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, dipicu dari konflik antar etnis, perbedaan agama yang memicu adanya tindak diskriminasi yang tertuju pada etnis Rohingya yang berlangsung puluhan tahun. Sedangkan pemerintah Myanmar sendiri telah melepas status kewarganegaraan rakyat Rohingya. Sehingga keadaan semakin menjadi yang kemudian pecah menjadi tindakan persekusi, pembantaian, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Pilihan paling rasional bagi rakyat Rohingya dari keadaan itu adalah pergi bermigrasi ke Negara lain, terutama Bangladesh yang letaknya paling dekat. Awalnya pengungsi diterima dengan baik di Bangladesh namun karena semakin banyaknya pengungsi yang harus ditampung dan mengingat Bangladesh bukanlah negara yang benar – benar makmur. Akhirnya Bangladesh menegaskan bahwa mereka tidak sanggup menerima lebih banyak pengungsi lagi yang kemudian Bangladesh mengajak Myanmar melakukan upaya untuk mengatasi pengungsi Rohingya melalui sekuritisasi masalah pengungsi yang meliputi aspek hukum, kebijakan pemerintah, *saliency*, penahanan, serta pencegahan. Namun untuk

mengimplementasikan hal itu bukanlah perkara mudah, perlu adanya persiapan dan langkah tepat dalam menjalankan upaya tersebut

1.9 Metode Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono (2006 : 3) Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan megatasipasi permasalahan dalam suatu penelitian.

1.9.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, upaya yang dilakukan Bangladesh dalam menanggulangi persoalan pengungsi Rohingya akan menjadi f

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi mengenai fenomena atau isu yang belum pernah diteliti sebelumnya atau yang memiliki informasi yang sangat sedikit. Maka dari itu peneliti mengumpulkan informasi secara kualitatif sehingga dapat digunakan untuk memberi gambaran mengenai bagaimana upaya Bangladesh kepada pengungsi Rohingya di negaranya akibat konflik sipil di Rakhine State serta dinamika yang terjadi antar Bangladesh – Myanmar dalam menjalankan upaya tersebut dan menekankan pada proses untuk mendeskripsikan suatu masalah.

1.9.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur penelitian yang dapat menggambarkan suatu kejadian baik dalam kelompok maupun individu mengenai suatu fenomena dan masalah yang akan diteliti.

A. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri bisa diartikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Negara dalam hubungannya dengan Negara atau actor non Negara di pentas internasional. (Wuryandari, 2016).

B. Pengungsi

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 *UN Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 adalah

“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”

Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan(Sakharina & Kadarudin, 2016).

C. Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi (Sudarnoto, 2015).

1.9.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugjono, 2013: 141). Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas mengenai objek kajian yang akan diangkat oleh peneliti, agar peneliti tidak terjebak dengan banyak data yang nantinya akan diperoleh di lapangan. Maka dari itu penelitian ini akan difokuskan berdasarkan upaya Bangladesh sebagai langkah untuk menindaki isu pengungsi Rohingya.

Tabel 1. 2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Keterangan
Upaya Bangladesh Dalam Menanggulangi Isu Pengungsi Rohingya	Pemerintah	Hukum	Unsur yang menjelaskan tentang aturan mengenai pengungsi di Bangladesh dan hukum tentang kewarganegaraan di Myanmar serta hukum internasional yang mengatur tentang isu ini
		Kebijakan Pemerintah	Menganalisa lembaga khusus yang bergerak dibidang migrasi/pengungsi dan

			<p>elemen – elemen lain seperti organisasi internasional yang berfokus mengatasi permasalahan tersebut</p>
		Saliency	<p>Merupakan unsur yang menyatakan langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Negara melalui kesepakatan dengan target dan hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu</p>
		Pencegahan	<p>Menganalisa penyebab yang memicu terjadinya arus migrasi serta memberikan sanksi sesuai hukum internasional yang berlaku jika terbukti melanggar hukum internasional guna mencegah lebih banyak arus migrasi yang datang</p>
		Penahanan	<p>Menganalisa proses</p>

			penahanan yang dilakukan Bangladesh terhadap pelanggaran yang dilakukan etnis Rohingya apakah sudah sesuai prosedur atau justru melanggar hak mereka sebagai manusia
--	--	--	--

1.9.1 Unit Analisis

Dalam melakukan penelitian diharuskan memiliki sebuah unit analisis. Unit analisis diperlukan penulis sebagai tempat melakukan suatu penelitian dengan tujuan mengungkap fenomena/peristiwa yang terjadi dari objek tertentu supaya mendapat data – data yang akurat dalam melakukan penelitian tersebut.

Unit analisis merupakan sesuatu yang diteliti berupa organisasi atau lembaga, kelompok orang, kejadian, atau hal – hal yang dijadikan objek penelitian (Albi A, J. S, 2018).

Dalam mempertimbangkan hal tersebut penulis memilih pemerintah Bangladesh dalam melihat upaya yang dilakukan selama penanggulangan pengungsi Rohingya sebagai unit analisis. Penerapan unit analisis ini karena penulis ingin meneliti langkah yang diambil Bangladesh sebagai negara dengan jumlah pengungsi Rohingya terbanyak didunia.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang cocok dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yakni data yang diperoleh melalui data - data yang berasal dari hasil rekaman wawancara, foto, artikel, dokumen perusahaan yang dikumpulkan, laporan tertulis/online, buku, jurnal tertulis/ online, penelitian sebelumnya yang berkaitan, maupun arsip-arsip yang ada. Selain itu terdapat data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung untuk proses penelitian.

1.9.3 Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif, data bisa didapatkan melalui berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Maka dari itu untuk melakukan penelitian ini Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan melalui beberapa sumber dengan cara pengecekan ulang data yang didapatkan, kemudian membandingkan dengan sumber data lain. Dengan demikian teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang berbeda (sugiyono, 2016).

1.9.4 Teknik Analisa Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan Teknik analisis sekunder (*secondary*

analysis). Teknik analisis sekunder merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan praktik analisis terhadap data yang telah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain ataupun data yang dikumpulkan oleh instansi – instansi pemerintah untuk meneliti pertanyaan penelitian. Analisis sekunder ini terbagi menjadi analisis sekunder data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memakai jenis data kualitatif, maka dari itu teknik analisa data yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisis sekunder data kualitatif. Melalui teknik analisa ini, penulis tidak hanya sekedar mengutip dari penelitian yang telah ada, namun melakukan analisis ulang kepada data yang telah didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imran, H. F., & Mian, N. (2014). The Rohingya refugees in Bangladesh: A vulnerable group in law and policy. *Journal of Studies in Social Sciences*, 8(2).
- Albi A, J. S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. sukabumi: CV Jejak.
- Aung, T. T. (2019, August 15). *Exclusive: Myanmar, Bangladesh agree to start Rohingya repatriation next week*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-exclusive-idUSKCN1V51O5>
- Beake, N. (2018, December 28). What awaits any Rohingya refugees who return to Myanmar? Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-46312889>
- Chatzky, Andrew. A, E. (2018, Desember 5. The Rohingya Crisis. Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/rohingya-crisis>
- Elen, O. P. (2020). Pengaruh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pembatalan Perjanjian Repatriasi Etnis Rohingya 2018.
- Fang, S., & Stone, R. W. (2012). International organizations as policy advisors. *International organization*, 66(4), 537-569.
- Foundation, X. (2018, August 28). 'The Rohingya Amongst Us': Bangladeshi Perspectives on the Rohingya Crisis Survey. Retrieved from Xchange Reserch Of Migration: <http://xchange.org/bangladeshi-perspectives-on-the-rohingya-crisis-survey/>
- Foundation, X. (2018, May 23). Rohingya Repatriatio Survey. Retrieved from Xchange Research on Migration: <http://xchange.org/rohingya-repatriation-survey/>
- Gambia: Putusan ICJ Soal Rohingya 23 Januari, (2020, Januari 16). *Republika*, h. 7.
- Gao, C. (2017, September 13). The Diplomat. Retrieved from On Rohingya Issue, Both China and India Back Myanmar Government: <https://thediplomat.com/2017/09/on-rohingya-issue-both-china-and-india-back-myanmar-government/>
- Hardi A, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 1-17 .
- Hardjaloka, L. (2018). Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya (Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation in Indonesia and Other Countries). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Harrison, L. (2001). *Political Research : An Introduction*. London: Routledge.

- Huang, C. d. (2019, February 7). Toward Medium-Term Solutions for Rohingya Refugees and Hosts in Bangladesh: Mapping Potential Responsibility-Sharing Contributions. Retrieved from Center For Global Development: <https://www.cgdev.org/publication/toward-medium-term-solutions-rohingya-refugees-and-hosts-bangladesh-mapping-potential>
- Human Rights Watch. (2000). Discrimination in Arakan. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm>
- Human Rights Watch. (2019, August 20). Myanmar/Bangladesh: Halt Rohingya Returns. Retrieved from Human Rights Watch: [https://www.hrw.org/news/2019/08/20/myanmar/bangladesh-halt-rohingya-returns#:~:text=\(New%20York\)%20%E2%80%93%20The%20Myanmar,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.](https://www.hrw.org/news/2019/08/20/myanmar/bangladesh-halt-rohingya-returns#:~:text=(New%20York)%20%E2%80%93%20The%20Myanmar,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.)
- Human Security Unit, Human Security in Theory and Practice.* (2019, Januari 21). Diambil kembali dari United Nations Trust Fund for Human Security: <https://www.un.org/humansecurity/>
- Hurd, I. (1999). Legitimacy and authority in international politics. *International organization*, 379-408.
- Illfana, Z.R. (2017). *Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya*. (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017). Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/36158/>
- International Crisis Group. (2019, April 25). Building a Better Future for Rohingya Refugees in Bangladesh. Retrieved from International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b155-building-better-future-rohingya-refugees-bangladesh>
- jawapos. (2017, september 3). *Negara-negara Tujuan Pelarian Muslim Rohingya untuk Mengungsikan Diri*. <https://www.jawapos.com/internasional/03/09/2017/negara-negara-tujuan-pelarian-muslim-rohingya-untuk-mengungsikan-diri/>
- Kapur, R. (2018, march 16). 287 : The Repatriation of the Rohingyas: A Flawed Bangladesh-Myanmar Agreement? Retrieved from Institute of South East Asia Studies: <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/287-the-repatriation-of-the-rohingyas-a-flawed-bangladesh-myanmar-agreement/>
- Khan, I. H. (2014, May 21). *Bangladesh's Obligation Towards Refugees*. Retrieved from Dhaka Tribune: <https://www.dhakatribune.com/uncategorized/2014/05/21/bangladeshs-obligation-towards-refugees>
- Kompas. (2020, Mei 12). PBB Ingatkan Bangladesh Komitmen Relokasi Sukarela. h. 4.

- Kompas. (2020, Januari 22). Kejahatan Perang di Rakhine. h. 8
- Kompas. (2020, Januari 28). China Perkuat "Kuku di Myanmar. h. 4.
- Koswaraputra, D. (2019, Juli 12). Bangladesh Bisa Tekan Myanmar Bayar Kejahatannya Atas Myanmar. Dipetik Januari 25, 2020, dari AA: <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/opini-bangladesh-bisa-tekan-myanmar-bayar-kejahatannya-atas-rohingya/1530036>
- Maizland, Lindsay. A, E. (2019, Desember 13). The Rohingya Crisis. Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/rohingya-crisis>
- McKittrick, A. (2008). UNHCR as an autonomous organisation: complex operations and the case of Kosovo. Oxford University: Refugee Studies Centre.
- McPherson, P. d. (2018, December 18). Erasing The Rohingya, Point of No. Retrieved from Reuters Investigate: <https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rohingya-return/#:~:text=Erasing%20The%20Rohingya,Point%20of%20No%20Return,purge%20of%20the%20Rohingya%20permanent.>
- Myanmar-The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied.* (2004, Mei 18). Diambil kembali dari Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/>
- Myanmar Hargai Pendapat Indonesia, (2016, Desember 6). Kompas, h. 9.
- Naser, M. M. (2007). Protection of Refugees in Bangladesh: Towards a Comprehensive Legal Regime. Dhaka University Law Journal, 109-130.
- National University of Singapore. (2018). The Repatriations of Rohingyas: A Flawed. Institute of South Asian Studies, 1-12.
- Olivia, Y. (2014). Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program UNHCR "United Nations Joint Initiative" Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011). *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1-15.
- Paul, R. d.-M. (2018, January 16). Bangladesh agrees with Myanmar to complete Rohingya return in two years. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh-idUSKBN1F50I2>
- Perlez, J. (2014, November 6). *The New York Times*. Diambil kembali dari Myanmar Policy's Message to Muslims : Get Out: <https://www.nytimes.com/2014/11/07/world/asia/rohingya-myanmar-rakhine-state-thailand-malaysia.html>
- Pratama, F. (2017, September 8). *Dubes RI untuk Myanmar Buka-bukaan Soal Latar Belakang Krisis Rohingya*. Dipetik January 25, 2020, dari Detik News:

<https://news.detik.com/berita/d-3633773/dubes-ri-untuk-myanmar-buka-bukaan-soal-latar-belakang-krisis-rohingya>

Ramadhani, B. A. (2016). Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012.

Reach Out Refugee Protection Training Project, UNHCR. (2017, September 12). Diambil kembali dari The UN Refugee Agency:
<https://www.unhcr.org/partners/projects/4371d8362/reach-refugee-protection-training-project-handouts-refugee-protection.html>

Refworld. (2001, Maret 28). *Bangladesh: Information on the situation of Rohingya refugees*. <https://www.refworld.org/docid/3deccb113.html>

Republika. (2018, Maret 1). Ribuan Reohingya Kembali ke Pengungsian Bangladesh. h. 7.

Republika. (2020, Januari 18). Rakhine Jadi Pelabuhan Cina. h. 8.

Republika. (2017, September 13). Derita Pengungsi Rohingya. h. 28

Republika. (2018, Oktober 18). DK PBB akan Bahas Rohingya. h. 7.

Reuter. (2017, September 16). *Bangladesh Ancam Myanmar Terkait Pelanggaran Wilayah*. Diambil kembali dari CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170916111325-106-242159/bangladesh-ancam-myanmar-terkait-pelanggaran-wilayah>

Sakharina, K. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena.

Santri, M., & Syahartijan, Z. A. L. O. M. (2018). PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA (STUDI KASUS PADA KONFLIK TAHUN 2012-2017). *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 3(4).

Shiddiqul, D. (2019, March 1). Bangladesh Tak Mampu Lagi Terima Pengungsi Rohingya. Retrieved from CNN Indonesia: Bangladesh Tak Mampu Lagi Terima Pengungsi Rohingya

Sudarnoto, W. (2015). Konflik dan Resolusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 2, No 1.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

The World Factbook. (2020, December 17). Retrieved from Central Intelligence Agency:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html>

- Thontowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 8(1).
- Uddin, N. (2018, November 22). Ongoing Rohingya repatriation efforts are doomed to failure. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/opinions/2018/11/22/ongoing-rohingya-repatriation-efforts-are-doomed-to-failure>
- UN Information Centre. (2019, May 14). UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar urges financial isolation of Myanmar military. Retrieved from Reliefweb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/un-independent-international-fact-finding-mission-myanmar-urges-financial-isolation>
- UNHCR Peringatkan Pemulangan Rohingya, (2018, November 13). *Republika*.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (1996). Handbook on Voluntary Repatriation: International Protection. Retrieved from The UN Refugee Agencies: <https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2014). Protecting the Rights of Stateless Persons. Retrieved from The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/519e20989/protecting-rights-stateless-persons-january-2014.html?query=Protecting%20the%20Rights%20of%20Stateless%20Persons:%20The%201954%20Convention%20relating%20to%20the%20Status%20of%20Stateless%20Persons>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2018, November 11). Statement by UN High Commissioner for Refugees on the repatriation of Rohingya refugees to Myanmar. Retrieved from The UN Refugee Agencies: <https://www.unhcr.org/news/press/2018/11/5be7c4b64/statement-un-high-commissioner-refugees-repatriation-rohingya-refugees.html>
- Walker, N. a. (2018, April 12). Debate on petitions relating to Burma's Rohingya minority. Retrieved from UK Parliament: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2018-0086/>
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Transnasional*, 4(2), 834-847.
- World Food Programme. (2018, March 16). Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis: An appeal for US\$ 951 million to assist 1.3 million people. Retrieved from WFP Saving lives Changing Lives: <https://www.wfp.org/news/joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis->

